

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan

a. Bidang Pengawasan Internal

1. Ditetapkannya Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI sebagai peradilan dalam menangani masalah pengaduan dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
2. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Mahkamah Syar'iyah Aceh baik dalam bidang administrasi perkara, teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun kepaniteraan telah dilaksanakan.

b. Bidang Pengelolaan Administrasi Perkara

1. Penyelesaian perkara tahun 2013 pada tingkat banding telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, perkara diterima tahun 2013 berjumlah 103 perkara ditambah dengan sisa tahun 2012 sebanyak 6 perkara, sehingga berjumlah 109 perkara, yang diselesaikan 102 perkara, sedangkan sisa akhir tahun sebanyak 7 perkara.
2. Perspektif Kuantitas, perkara yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah se Aceh pada tahun 2013 sebanyak 6.385 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2012 sebanyak 970 perkara.

3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki/disempurnakan.

2. Sektor Administrasi Kesekretariatan

a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Penata Usahaan bidang Kepegawaian, Keuangan dan Umum telah dilaksanakan sesuai Pedoman pelaksanaan, walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan baik sarana dan prasarana maupun Sumberdaya Manusianya.
2. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pejabat dan karyawan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : W1-A1/01/OT.00/I/2012 Tanggal 3 Januari 2013 telah menetapkan Pembahagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan karyawan.
3. Sumberdaya Panitera pengganti, Jurusita Pengganti dan tenaga staf masih dirasakan kurang, sehingga untuk memenuhi formasi dan melaksanakan tugas-tugas pada Mahkamah Syar'iyah se Aceh harus rangkap jabatan dalam beberapa jabatan antara jabatan Panitera Pengganti dan jabatan Struktural.

b. Sektor Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Dengan fasilitas gedung yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh yang saat ini menggunakan gedung representative dengan beban kerja yang cukup tinggi.

c. Sektor Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan laporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.
2. Dalam hal pelaksanaan anggaran ada sedikit kendala, yakni pencairan anggaran bertumpuk diakhir tahun anggaran, sedangkan diawal tahun anggaran realisasi minim sekali, hal ini diantaranya juga disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa.

B. REKOMENDASI

1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan

a. Bidang Pengawasan Internal

Mengingat penting dan strategisnya penegakan dan efektivitas penegakan dan penanganan pengaduan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik hukum, perlu diselenggarakan pelatihan dan

pendidikan peningkatan skill aparatur Mahkamah Syar'iyah penanggung jawab Penanganan, Pengawasan dan Pengaduan.

b. Bidang Administrasi Keperkareraan

- 1) Mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang pola Bindalmin yang telah direvisi.
- 2) Mohon kepada Mahkamah Agung RI c/q. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI untuk meningkatkan alokasi dana bidang Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta operasional persidangan peradilan.

2. Sektor Administrasi Kesekretariatan

a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- 1) Mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh disampaikan kepada Mahkamah Agung RI untuk mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan memperhatikan hasil Analysis Assesment dan pemetaan Jabatan seraf Beezeting Formation yang dilaporkan setiap tahunnya.

b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- 1) Dengan adanya pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Mahkamah Syar'iyah Aceh hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang

Teknologi Informasi. Sehingga hendaknya dana pemeliharaan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan.

2) Mohon kepada Mahkamah Agung RI unruk mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan kedaerah tentang buku-buku Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Ketatalaksanaan, Kearsipan dan Keprotokolan.

c. Bidang Pengelolaan Keuangan

1) Mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh disampaikan kepada Mahkamah Agung RI untuk lebih meningkatkan pembinaan ke daerah tentang Administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai denga pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif diinformasikan kedaerah secara integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada.

2) Mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh disampaikan kepada Mahkamah Agung RI untuk membuat suatu aturan atau edaran yang menekankan kepada daerah untuk lebih aktif membuat rencana penarikan dana DIPA secara periodik sesuai dengan aturan yang berlaku.